



SALINAN

BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang mendesak namun tidak tersedia anggarannya pada APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana diatur pada angka 3 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 dan pada huruf i angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas dengan menyesuaikan SILPA BLUD dan Penambahan Pendapatan BLUD;
 - c. bahwa untuk menyesuaikan pemenuhan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD serta Tunjangan Khusus Guru dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran 2024;
 - d. bahwa untuk menyesuaikan SILPA pada APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023;
 - e. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian Anggaran Belanja OPD Tahun 2024;
 - f. bahwa berdasarkan diktum pada huruf a, b, c, d dan e dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi dan Peraturan Perpajakan;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi dan Peraturan Perpajakan;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4422);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAJENE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan berubah menjadi Rp. 928.791.122.594,- (*sembilan ratus dua puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah*) atau naik sebesar Rp. 10.205.447.522 (*sepuluh milyar dua ratus lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima dua puluh dua rupiah*), dari Anggaran Pendapatan dalam APBD Pokok sebesar Rp. 918.585.675.072,- (*sembilan ratus delapan belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan berubah sebesar Rp.128.878.577.378,- (*seratus dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah*) atau naik sebesar Rp. 7.735.402.022 (*tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu dua puluh dua rupiah*) dari Anggaran Pendapatan dalam APBD Pokok sebesar Rp.121.143.175.356,- (*seratus dua puluh satu miliar seratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah*) , yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sama dari Anggaran Pajak Daerah dalam APBD Pokok sebesar Rp. 23.913.160.000,- (*Dua Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan berubah sebesar Rp. 84.928.834.988,- (*delapan puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*) atau naik sebesar Rp. 7.735.402.022,- (*tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu dua puluh dua rupiah*) dari Anggaran Retribusi Daerah dalam APBD Pokok sebesar Rp.77.193.432.966,- (*tujuh puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah*).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sama dari Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam APBD Pokok sebesar Rp. 13.201.261.390,- (*Tiga Belas Miliar Dua Ratus Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (5) Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sama dari Anggaran Lain-lain PAD yang Sah dalam APBD Pokok sebesar Rp. 6.835.321.000,- (*Enam Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Pasal 4

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 direncanakan sama dari Anggaran Pajak Daerah dalam APBD Pokok sebesar Rp 23.913.160.000,- (*Dua Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Sarang Burung Walet;
 - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sama dari Anggaran Pajak Hotel dalam APBD Pokok sebesar Rp. 949.170.000,- (*Sembilan Ratus Empat puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sama dari Anggaran Pajak Restoran dalam APBD Pokok sebesar Rp. 2.100.002.000,- (*Dua Miliar Seratus Juta Dua Ribu Rupiah*).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sama dari Anggaran Pajak Hiburan dalam APBD Pokok sebesar Rp. 262.800.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sama dari Anggaran Pajak Reklame dalam APBD Pokok sebesar Rp. 1.503.201.250,- (*Satu Miliar Lima Ratus Tiga Juta Dua Ratus Seribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sama dari Anggaran Pajak Penerangan Jalan dalam APBD Pokok sebesar Rp. 9.000.043.488,- (*Sembilan Miliar Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).

- (7) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sama dari Anggaran Pajak Sarang Burung Walet dalam APBD Pokok sebesar Rp. 130.000.000,- (*Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sama dari Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam APBD Pokok sebesar Rp. 3.467.943.262,- (*Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sama dari Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam APBD Pokok sebesar Rp. 2.500.000.000,- (*Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sama dari Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam APBD Pokok sebesar Rp. 4.000.000.000,- (*Empat Milyar Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan direncanakan berubah sebesar Rp. 84.928.834.988,- (*delapan puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*) atau naik sebesar Rp. 7.735.402.022,- (*tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu dua puluh dua rupiah*) dari Anggaran Retribusi Daerah dalam APBD Pokok sebesar Rp. 77.193.432.966,- (*tujuh puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah*). yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan berubah sebesar Rp. 78.031.360.988,- (*tujuh puluh delapan miliar tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*) atau naik sebesar Rp. 7.735.402.022,- (*tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu dua puluh dua rupiah*) dari Anggaran Retribusi Jasa Umum dalam APBD Pokok sebesar Rp. 70.295.958.966,- (*tujuh puluh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sama dari Anggaran Retribusi Jasa Usaha dalam APBD Pokok sebesar Rp. 5.697.474.000,- (*Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah*).

- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sama dari Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu dalam APBD Pokok sebesar Rp. 1.200.000.000,- (*Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sama dari Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dalam APBD Pokok sebesar Rp. 13.201.261.390,- (*Tiga Belas Miliar Dua Ratus Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada BUMD.
- (2) Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sama dari Anggaran Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada BUMD dalam APBD Pokok sebesar Rp. 13.201.261.390,- (*Tiga Belas Miliar Dua Ratus Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d direncanakan sama dari Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam APBD Pokok sebesar Rp. 6.835.321.000,- (*Enam Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil Kerja Sama Daerah;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - f. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - g. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
- (2) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sama dari Anggaran Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan dalam APBD Pokok sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sama dari Anggaran Jasa Giro dalam APBD Pokok sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*Satu Miliar Rupiah*).

- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sama dari Anggaran Pendapatan Bunga dalam APBD Pokok sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*).
- (5) Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sama dari Anggaran Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dalam APBD Pokok sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*Satu Miliar Rupiah*).
- (6) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sama dari Anggaran Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dalam APBD Pokok sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (7) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sama dari Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah dalam APBD Pokok sebesar Rp. 4.585.321.000,- (*Empat Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*)

Pasal 8

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan berubah sebesar Rp. 799.912.545.216,- (*tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus dua belas juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam belas rupiah*) atau naik sebesar Rp. 2.470.045.500,- (*dua miliar empat ratus tujuh puluh juta empat puluh lima ribu lima ratus rupiah*) dari Anggaran Pendapatan Transfer dalam APBD Pokok sebesar Rp. 797.442.499.716,- (*tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan berubah sebesar Rp. 774.943.166.500,- (*tujuh ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah*) atau naik sebesar Rp. 2.470.045.500,- (*dua miliar empat ratus tujuh puluh juta empat puluh lima ribu lima ratus rupiah*) dari Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam APBD Pokok sebesar Rp. 772.473.121.000,- (*tujuh ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sama dari Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam APBD Pokok sebesar Rp. 24.969.378.716,- (*dua puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam belas rupiah*).

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan berubah sebesar Rp. 774.943.166.500,- (*tujuh ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah*) atau naik sebesar Rp. 2.470.045.500,- (*dua miliar empat ratus tujuh puluh juta empat puluh lima ribu lima ratus rupiah*) dari Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam APBD Pokok sebesar Rp. 772.473.121.000,- (*tujuh ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID);
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan berubah sebesar Rp. 720.808.335.500,- (*tujuh ratus dua puluh miliar delapan ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah*) atau naik sebesar Rp. 2.470.045.500,- (*dua miliar empat ratus tujuh puluh juta empat puluh lima ribu lima ratus rupiah*) dari Anggaran Dana Perimbangan dalam APBD Pokok sebesar Rp. 718.338.290.000,- (*tujuh ratus delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sama dari Anggaran Dana Insentif Daerah dalam APBD Pokok sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sama dari Anggaran Dana Desa dalam APBD Pokok sebesar Rp. 54.134.831.000,- (*lima puluh empat miliar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sama dari Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam APBD Pokok sebesar Rp. 24.969.378.716,- (*Dua Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sama dari Anggaran Pendapatan Bagi Hasil dalam APBD Pokok sebesar Rp. 24.969.378.716,- (*Dua Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sama dari Anggaran Anggaran Lain-lain pendapatan daerah dalam APBD Pokok sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah;
 - b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sama dari Anggaran Pendapatan Hibah dalam APBD Pokok sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).
- (3) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sama dari Anggaran Lain-lain Pendapatan dalam APBD Pokok sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sama dari Anggaran Pendapatan Hibah dalam APBD Pokok sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sama dari Anggaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dalam APBD Pokok sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sama dari Anggaran Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam APBD Pokok sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- (2) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sama dari Anggaran Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam APBD Pokok sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan berubah sebesar Rp. 936.376.859.040,- (*sembilan ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat puluh rupiah*) atau turun sebesar Rp. 3.414.666.037,- (*tiga miliar empat ratus empat belas juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah*) dari Anggaran Belanja Daerah dalam APBD Pokok sebesar Rp. 939.791.525.077,- (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 15

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan berubah sebesar Rp. 741.826.887.381,- (*tujuh ratus empat puluh satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah*) atau turun sebesar Rp. 5.076.605.913,- (*lima miliar tujuh puluh enam juta enam ratus lima ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah*) dari Anggaran Belanja Operasi dalam APBD Pokok sebesar Rp. 746.903.493.294,- (*Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan berubah sebesar Rp. 414.920.693.810,- (*empat ratus empat belas miliar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah*) atau turun sebesar Rp. 18.735.804.505,- (*delapan belas miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat ribu lima ratus lima puluh lima rupiah*) dari Anggaran Belanja Pegawai dalam APBD Pokok sebesar Rp. 433.656.498.315,- (*Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan berubah sebesar Rp. 288.197.200.265,- (*dua ratus delapan puluh delapan miliar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu dua ratus enam puluh lima rupiah*) atau naik sebesar Rp. 13.659.198.592,- (*tiga belas miliar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah*) dari Anggaran Belanja Barang dan Jasa dalam APBD Pokok sebesar Rp. 274.538.001.673,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sama dari Anggaran Belanja Hibah dalam APBD Pokok sebesar Rp. 38.644.193.306,- (*Tiga Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sama dari Anggaran Belanja Bantuan Sosial dalam APBD Pokok sebesar Rp. 64.800.000,- (*Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan berubah sebesar Rp. 414.920.693.810,- (*empat ratus empat belas miliar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah*) atau turun sebesar Rp. 18.735.804.505,- (*delapan belas miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat ribu lima ratus lima rupiah*) dari Anggaran belanja pegawai dalam APBD Pokok sebesar Rp. 433.656.498.315,- (*Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta KDH/WKDH;
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan berubah sebesar Rp. 322.031.419.312,- (*tiga ratus dua puluh dua miliar tiga puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus dua belas rupiah*) atau turun sebesar Rp. 20.705.166.511,- (*dua puluh miliar tujuh ratus lima juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus sebelas rupiah*) dari Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN dalam APBD Pokok sebesar Rp. 342.736.585.823,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*), Terdiri atas :

- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian.
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan berubah sebesar Rp. 9.426.934.964,- (*sembilan miliar empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah*) atau turun sebesar Rp. 99.239.236,- (*sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah*) dari Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN dalam APBD Pokok sebesar Rp. 9.526.174.200,- (*Sembilan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah*), Terdiri atas :
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan berubah sebesar Rp. 75.128.595.300,- (*tujuh puluh lima miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah*) atau naik sebesar Rp. 2.470.045.500,- (*dua miliar empat ratus tujuh puluh juta empat puluh lima ribu lima ratus rupiah*) dari Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya ASN dalam APBD Pokok sebesar Rp. 72.658.549.800,- (*Tujuh Puluh Dua Miliar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah*), Terdiri atas :
- a. Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD.

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan berubah sebesar Rp. 7.570.307.374,- (*tujuh miliar lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah*) atau turun sebesar Rp. 475.744.258,- (*empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah*) dari Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dalam APBD Pokok sebesar Rp. 8.046.051.632,- (*Delapan Miliar Empat Puluh Enam Juta Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*), Terdiri atas :
- a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Uang Paket DPRD;
 - d. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat kelengkapan Lainnya DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. Belanja Reses DPRD;
 - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - j. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan berubah sebesar Rp. 178.636.860,- (*Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah*) atau naik sebesar Rp. 380.000,- (*tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*) dari Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dalam APBD Pokok sebesar Rp. 178.256.860,- (*Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah*), Terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - e. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - f. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - i. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.

- (7) Belanja Penerimaan Lainnya DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan berubah sebesar Rp. 584.800.000,- (*lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*) atau naik sebesar Rp. 73.920.000,- (*tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*) dari Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya DPRD serta KDH/WKDH dalam APBD Pokok sebesar Rp. 510.880.000,- (*Lima Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*), Terdiri atas :
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) direncanakan berubah sebesar Rp. 288.197.200.265,- (*dua ratus delapan puluh delapan miliar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu dua ratus enam puluh lima rupiah*) atau naik sebesar Rp. 13.659.198.592,- (*tiga belas miliar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah*) dari Anggaran Anggaran Belanja Barang dan Jasa dalam APBD Pokok sebesar Rp. 274.538.001.673,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 68.431.547.907,- (*enam puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*) atau naik sebesar Rp. 1.178.890.664,- (*satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*) dari Anggaran Belanja Barang dalam APBD Pokok sebesar Rp. 67.252.657.243,- (*Enam Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*), Terdiri atas :
- a. Belanja Bahan Pakai Habis;
 - b. Belanja Bahan/Material;
 - c. Belanja Cetak/Penggandaan;
 - d. Belanja Makanan dan Minuman;

- e. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya;
 - f. Belanja Pakaian Kerja;
 - g. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu.
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan berubah sebesar Rp. 78.495.859.161,- (*tujuh puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah*) atau turun sebesar Rp. 1.917.967.472,- (*satu miliar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah*) dari Anggaran Belanja Jasa dalam APBD Pokok sebesar Rp. 80.413.826.633,- (*Delapan Puluh Miliar Empat Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*), Terdiri atas :
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Jasa Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir;
 - d. Belanja Sewa Sarana Mobilitas;
 - e. Belanja Sewa Alat Berat;
 - f. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi;
 - h. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK.
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan berubah sebesar Rp. 13.777.286.431,- (*tiga belas miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah*) atau turun sebesar Rp. 3.006.970.712,- (*tiga miliar enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua belas rupiah*) dari Anggaran Belanja Pemeliharaan dalam APBD Pokok sebesar Rp. 16.784.257.143,- (*Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah*), Terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
 - e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor.

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan berubah sebesar Rp. 24.442.818.252,- (*dua puluh empat miliar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah*) atau naik sebesar Rp. 2.485.424.750,- (*dua miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) dari Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dalam APBD Pokok sebesar Rp. 21.957.393.502,- (*Dua Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Rupiah*), Terdiri atas :
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah;
 - c. Belanja Pemulangan Pegawai.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sama dari Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dalam APBD Pokok sebesar Rp. 304.400.000,- (*Tiga Ratus Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*), Terdiri atas :
- a. Belanja Barang dan/atau Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga;
 - b. Belanja Barang dan/atau Jasa yang dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga;
 - c. Belanja Pemberian Uang yang diberikan kepada Masyarakat.
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sama dari Belanja Barang dan Jasa BOS dalam APBD Pokok sebesar Rp. 26.914.200.000,- (*Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*), Terdiri atas :
- a. Belanja Barang dan Jasa BOS
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan berubah sebesar Rp. 75.831.088.514,- (*tujuh puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah*) atau naik sebesar Rp. 14.919.821.362,- (*empat belas miliar Sembilan ratus Sembilan belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah*) dari Belanja Barang dan Jasa BLUD dalam APBD Pokok sebesar Rp. 60.911.267.152,- (*Enam Puluh Miliar Sembilan Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah*), Terdiri atas :
- a. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Pasal 18

Anggaran Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4) direncanakan sama dari Anggaran Belanja Bunga dalam APBD Pokok sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 19

Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (5) direncanakan sama dari Anggaran Belanja Subsidi dalam APBD Pokok sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (6) direncanakan sama dari Anggaran Belanja Hibah dalam APBD Pokok sebesar Rp. 38.644.193.306,- (*Tiga Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah*). yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah dana BOS;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sama dari Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dalam APBD Pokok sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*), Terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat;
- (3) Belanja Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sama dari Anggaran Belanja Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dalam APBD Pokok sebesar Rp. 29.540.000.000,- (*Dua Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*), Terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang Kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Uang Kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia.
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sama dari Anggaran Belanja Hibah Dana BOS dalam APBD Pokok sebesar Rp. 8.393.000.000,- (*Delapan Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah*), Terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Negeri.
- (5) Belanja Hibah Bantuan keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sama dari Anggaran Belanja Hibah Bantuan keuangan Kepada Partai Politik dalam APBD Pokok sebesar Rp. 711.193.306,- (*Tujuh Ratus Sebelas Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah*), Terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Bantuan keuangan Kepada Partai Politik.

Pasal 21

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (7) direncanakan sama dari Anggaran Belanja Bantuan Sosial dalam APBD Pokok sebesar Rp. 64.800.000,- (*Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.

- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sama dari Anggaran Belanja Bantuan Sosial Uang dalam APBD Pokok sebesar Rp. 64.800.000,- (*Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), Terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga.

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan berubah sebesar Rp. 80.481.879.565,- (*delapan puluh miliar empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah*) atau naik sebesar Rp. 3.454.380.182,- (*tiga miliar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah*) dari Anggaran Belanja Modal dalam APBD Pokok sebesar Rp. 77.027.499.383,- (*Tujuh Puluh Tujuh Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sama dari Anggaran Belanja Modal Tanah dalam APBD Pokok sebesar Rp. 1.079.000.000,- (*Satu Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan berubah sebesar Rp. 15.350.940.515,- (*lima belas miliar tiga ratus lima puluh juta Sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus lima belas rupiah*) atau naik sebesar Rp. 814.463.153,- (*delapan ratus empat belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah*) dari Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin APBD dalam Pokok sebesar Rp. 14.536.477.362,- (*Empat Belas Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan berubah sebesar Rp. 37.433.351.880,- (*tiga puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*) atau turun sebesar Rp. 891.000.000,- (*delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah*) dari Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan dalam APBD Pokok sebesar Rp. 38.324.351.880,- (*Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan berubah sebesar Rp. 26.432.337.170,- (*dua puluh enam miliar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah*) atau naik sebesar Rp. 3.530.917.029,- (*tiga miliar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua puluh sembilan Rupiah*) dari Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dalam APBD Pokok sebesar Rp. 22.901.420.141,- (*Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sama dari Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dalam APBD Pokok sebesar Rp. 56.250.000,- (*Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sama dari Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya dalam APBD Pokok sebesar Rp. 130.000.000,- (*Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sama dari Anggaran Belanja Modal Tanah dalam APBD Pokok sebesar Rp. 1.079.000.000,- (*Satu Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah.
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan direncanakan sama dari Anggaran Belanja Modal Tanah dalam APBD Pokok sebesar Rp. 1.079.000.000,- (*Satu Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah*),

Pasal 24

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan berubah sebesar Rp. 15.350.940.515,- (*lima belas miliar tiga ratus lima puluh juta Sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus lima belas rupiah*) atau naik sebesar Rp. 814.463.153,- (*delapan ratus empat belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah*) dari Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin dalam APBD Pokok sebesar Rp. 14.536.477.362,- (*Empat Belas Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;

- e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - h. Belanja Modal Komputer;
 - i. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sama dari Anggaran Belanja Modal Alat Besar dalam APBD Pokok sebesar Rp. 8.625.000,- (*Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar Darat;
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan berubah sebesar Rp. 6.315.042.794,- (*enam miliar tiga ratus lima belas juta empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah*) atau naik sebesar Rp. 828.000.000,- (*delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah*) dari Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan dalam APBD Pokok sebesar Rp. 5.487.042.794,- (*Lima Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sama dari Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur dalam APBD Pokok sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Ukur.
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan berubah sebesar Rp. 1.834.011.107,- (*satu miliar delapan ratus tiga puluh empat juta sebelas ribu seratus tujuh rupiah*) atau naik sebesar Rp. 53.313.741,- (*lima puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah*) dari Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dalam APBD Pokok sebesar Rp. 1.780.697.366,- (*Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.

- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sama dari Belanja Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar dalam APBD Pokok sebesar Rp. 24.150.000,- (*Dua Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f direncanakan berubah sebesar Rp. 2.248.988.303,- (*dua miliar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*) atau naik sebesar Rp. 21.116.720,- (*dua puluh satu juta seratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*) dari Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan dalam APBD Pokok sebesar Rp. 2.227.871.583,- (*Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g direncanakan sama dari Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium dalam APBD Pokok sebesar Rp. 406.141.206,- (*Empat Ratus Enam Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h direncanakan berubah sebesar Rp. 1.020.685.858,- (*satu miliar dua puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah*) atau turun sebesar Rp. 30.313.741,- (*tiga puluh juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah*) dari Anggaran Belanja Modal Komputer dalam APBD Pokok sebesar Rp. 1.050.999.599,- (*Satu Miliar Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit;
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (10) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf i direncanakan sama dari Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga dalam APBD Pokok sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan Senam.

- (11) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf j direncanakan berubah sebesar Rp. 3.493.296.247,- (*tiga miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah*) atau turun sebesar Rp. 57.653.567,- (*lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*) dari Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD dalam APBD Pokok sebesar Rp. 3.550.949.814,- (*Tiga Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

Pasal 25

- (1) Belanja Modal Gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c di rencanakan sebesar Rp. 37.433.351.880,- (*tiga puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*) atau turun sebesar Rp. 891.000.000,- (*delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah*) dari Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan dalam APBD Pokok sebesar Rp. 38.324.351.880,- (*Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di rencanakan berubah sebesar Rp. 34.454.881.746,- (*tiga puluh empat miliar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*) atau turun sebesar Rp. 891.000.000,- (*delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah*) dari Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung dalam APBD Pokok sebesar Rp. 35.345.881.746,- (*Tiga Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b direncanakan sama dari Anggaran Belanja Modal Monumen dalam APBD Pokok sebesar Rp. 770.200.000,- (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
 - a. Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti.
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b direncanakan sama dari Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti dalam APBD Pokok sebesar Rp. 733.270.134,- (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah*);

a. Belanja Modal Modal Tugu/Tanda Batas.

(5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf c direncanakan sama dari Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD dalam APBD Pokok sebesar Rp. 1.475.000.000,- (*Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).

a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

Pasal 26

(1) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan berubah sebesar Rp. 26.432.337.170,- (*dua puluh enam miliar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah*) atau naik sebesar Rp. 3.530.917.029,- (*tiga miliar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua puluh sembilan Rupiah*) dari Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dalam APBD Pokok sebesar Rp. 22.901.420.141,- (*Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah*), terdiri atas:

a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;

b. Belanja Modal Bangunan Air;

c. Belanja Modal Instalasi.

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD

(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan berubah Rp. 21.993.837.761,- (*dua puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah*) atau naik sebesar Rp. 3.063.078.800,- (*tiga miliar enam puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*) dari Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan dalam APBD Pokok sebesar Rp. 18.930.758.961,- (*Delapan Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*), terdiri atas:

a. Belanja Modal Jalan;

b. Belanja Modal Jembatan.

(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan berubah sebesar Rp. 4.326.406.629,- (*empat miliar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus enam ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*) atau naik sebesar Rp. 467.838.229,- (*empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah*) dari Anggaran Belanja Modal Bangunan Air dalam APBD Pokok sebesar Rp. 3.858.568.400,- (*Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah*), terdiri atas:

a. Belanja Modal Air Irigasi;

- b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku.
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sama dari Anggaran Belanja Modal Instalasi dalam APBD Pokok sebesar Rp. 112.092.780,- (*Seratus Dua Belas Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik.

Pasal 27

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (6) direncanakan sama dari Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dalam APBD Pokok sebesar Rp. 56.250.000,- (*Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan.
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sama dari Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya dalam APBD Pokok sebesar Rp.130.000.000,- (*Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga; dan Belanja Transfer Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan berubah sebesar Rp. 1.513.528.994,- (*satu miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah*) atau turun sebesar Rp. 1.792.440.306 (*satu miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus enam rupiah*) dari Anggaran Belanja Tidak Terduga dalam APBD Pokok sebesar Rp. 3.305.969.300,- (*Tiga Miliar Tiga Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan berubah sebesar Rp. 1.513.528.994,- (*satu miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah*) atau turun sebesar Rp.1.792.440.306,- (*satu miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus enam rupiah*) dari Anggaran Belanja Tidak Terduga dalam APBD Pokok sebesar Rp. 3.305.969.300,- (*Tiga Miliar Tiga Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sama dari Anggaran Belanja Transfer dalam APBD Pokok sebesar Rp. 112.554.563.100,- (*Seratus Dua Belas Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil
 - b. Belanja Bantuan Keuangan
- (2) Anggaran belanja bagi Hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sama dari Anggaran belanja bagi Hasil dalam APBD Pokok sebesar Rp. 3.516.937.600,- (*Tiga Miliar Lima Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah kabupaten/Kota dan Desa
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sama dari Anggaran Belanja Bantuan Keuangan dalam APBD Pokok sebesar Rp. 109.037.625.500,- (*Seratus Sembilan Miliar Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.

Pasal 30

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan berubah sebesar Rp. 7.585.736.446,- (*tujuh miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah*) atau turun sebesar Rp. 13.620.113.559,- (*tiga belas miliar enam ratus dua puluh juta seratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah*) dari Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 dalam APBD Pokok sebesar Rp. 21.205.850.005,- (*Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 31

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan berubah sebesar Rp. 7.585.736.446,- (*tujuh miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah*) atau turun sebesar Rp. 13.620.113.559,- (*tiga belas miliar enam ratus dua puluh juta seratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah*) dari Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 dalam APBD Pokok sebesar Rp. 21.205.850.005,- (*Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan berubah sebesar Rp. 7.585.736.446,- (*tujuh miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah*) atau turun sebesar Rp. 13.620.113.559,- (*tiga belas miliar enam ratus dua puluh juta seratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah*) dari Anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dalam APBD Pokok sebesar Rp. 21.205.850.005,- (*Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Lima Rupiah*).
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sama dari Anggaran Pencairan dana cadangan dalam APBD Pokok sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).
 - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sama dari anggaran hasil penjual kekayaan daerah dalam APBD Pokok sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).
 - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sama dari Anggaran Penerimaan pinjaman daerah dalam APBD Pokok sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).
 - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sama dari anggaran penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dalam APBD Pokok sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).
 - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sama dari penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dalam APBD Pokok sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 32

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan berubah sebesar Rp. 7.585.736.446,- (*tujuh miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah*) atau turun sebesar Rp. 13.620.113.559,- (*tiga belas miliar enam ratus dua puluh juta seratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah*) dari Anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dalam APBD Pokok sebesar Rp. 21.205.850.005,- (*Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Lima Rupiah*).

Pasal 33

Anggaran Pencairan dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sama dari Anggaran Pencairan dana Cadangan dalam APBD Pokok sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 34

Anggaran Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c direncanakan sama dari Anggaran Hasil penjualan kekayaan daerah dalam APBD Pokok sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 35

Anggaran Penerimaan Pinjaman daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d direncanakan sama dari Anggaran Penerimaan Pinjaman daerah yang dipisahkan dalam APBD Pokok sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 36

Anggaran Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e direncanakan sama dari Anggaran Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman daerah yang dipisahkan dalam APBD Pokok sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Masyarakat.

Pasal 37

Anggaran Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f direncanakan sama dari Anggaran Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan daerah yang dipisahkan dalam APBD Pokok sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 38

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b direncanakan sama dari Anggaran Pengeluaran pembiayaan dalam APBD Pokok sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sama dalam APBD Pokok sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).
 - (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sama dalam APBD Pokok sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).
 - (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sama dalam APBD Pokok sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).
 - (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sama dalam APBD Pokok sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).
 - (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sama dalam APBD Pokok sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 39

Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sama dalam APBD Pokok sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 40

Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sama dalam APBD Pokok sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 41

Anggaran Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sama dalam APBD Pokok sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 42

Anggaran Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sama dalam APBD Pokok sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 43

Anggaran Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sama dalam APBD Pokok sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).

Pasal 44

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (7.585.736.446) (*Tujuh milliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah*) atau turun sebesar Rp. 13.620.113.559,- (*tiga belas milliar enam ratus dua puluh juta seratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah*) dari Anggaran Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah dalam APBD Pokok sebesar Rp. (21.205.850.005),- (*Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Lima Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan berubah Rp. 7.585.736.446,- (*Tujuh milliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah*) atau turun sebesar Rp. 13.620.113.559,- (*tiga belas milliar enam ratus dua puluh juta seratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah*) dari Anggaran Pembayaran Neto dalam APBD Pokok sebesar Rp. 21.205.850.005,- (*Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Lima Rupiah*).

Pasal 45

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VIa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
8. Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Kepala Daerah Tentang APBD;
10. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
11. Lampiran XVIIa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Hibah Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
12. Lampiran XVIIb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Hibah Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
13. Lampiran XVIIIa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
14. Lampiran XVIIIb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
15. Lampiran XIXa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat Umum yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
16. Lampiran XIXb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat Khusus yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
17. Lampiran XXb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
18. Lampiran XXc : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;

Pasal 46

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 45 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 48

Peraturan Bupati Majene ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 31 Oktober 2024

Pjs. BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

HABIBI AZIS

Diundangkan di Majene
pada tanggal 1 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024 NOMOR 14.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

